



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**SINKRONISASI HORIZONTAL PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN  
KERJASAMA OPERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum**

**IRFAN HUZAIRIN  
NPM. 0906581113**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
KEKHUSUSAN HUKUM KEUANGAN NEGARA  
SALEMBA  
JANUARI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Irfan Huzairin  
NPM : 0906581413  
Tanda Tangan :   
Tanggal : 7 Januari 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Irfan Huzairin  
NPM : 0906581113  
Program Studi : Pasca Sarjana Fakultas Hukum  
Judul Tesis : Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan  
dan Prosedur Pelaksanaan Kerjasama  
Operasi Pada Badan Layanan Umum

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Andhika Danesjvara, S.H., M.Si. (  )  
Penguji : Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. (  )  
Penguji :  Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Januari 2011

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam , karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum dengan konsentrasi hukum keuangan negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari, tanpa bantuan dari berbagai pihak, dari awal masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku yang telah banyak memberi dukungan berupa doa yang tulus untuk lancarnya tugas belajarku hingga selesai.
2. Anak-anakku Bela, Fikri, dan Fathimah yang telah memberi suasana gembira serta istriku Karti yang telah banyak memberi dorongan semangat dan menyediakan berbagai kebutuhan selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
3. Dr. Andhika Danesjvara, S.H., M.Si. yang telah bersedia menjadi pembimbing dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M. Ph.D dan Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. selaku dewan penguji yang memberi suasana santai sehingga dapat menghadapi sidang dengan baik dan memberi masukan agar tesis ini semakin sempurna.
5. Para Dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak berdiskusi sehingga menambah wawasan dan pengetahuan selama kegiatan perkuliahan.
6. Pihak Rumah Sakit Fatmawati dan BBPLKLN yang telah bersedia membantu menyediakan data yang dibutuhkan sehubungan dengan penulisan tesis ini.
7. Semua reka-rekan di kelas seangkatan tahun 2009 yang telah bersama-sama berdiskusi dan berbagi kebersamaan selama perkuliahan.
8. Sahabat yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu.  
Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Bekasi, 7 Januari 2011

Irfan Huzairin



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irfan Huzairin  
NPM : 0906581113  
Program Studi: Pasca Sarjana  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty free right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Sinkronisasi Horizontal Peraturan Perundang-Undangan Dan Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Operasi Pada Badan Layanan Umum.

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi  
Pada tanggal : 7 Januari 2010

Yang menyatakan

  
(Irfan Huzairin)

## ABSTRAK

Nama : Irfan Huzairin  
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Hukum  
Judul : Sinkronisasi Horizontal Peraturan Perundang-Undangan  
dan Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Operasi Pada  
Badan Layanan Umum

Dalam mendukung reformasi birokrasi menuju penerapan konsep *interpreuner the government* perlu dilakukan perbaikan prosedur pelaksanaan KSO dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pada Instansi BLU. Dalam melaksanakan KSO, BLU menemui berbagai kendala. Kendala yang dihadapi adalah prosedur pelaksanaan KSO belum diatur secara jelas dan terdapat peraturan perundang-undangan yang belum sinkron.. Tesis ini disusun menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dari analisis yang dilakukan permasalahan dapat diatasi dengan melakukan sinkronisasi, kemudian dibuat aturan prosedur pelaksanaan KSO yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kata kunci :  
KSO, BLU, Sinkronisasi.

## ABSTRACT

Nama : Irfan Huzairin  
Study Program : Magister of Law  
Title : Horizontal Synchronization of regulation and operating  
procedure for Joint Operation (JO) in the Public Service  
Agency (PSA)

In supporting the reform of bureaucracy towards the application of the *interpreuner the government* concept, needs a revision of the execution procedure and synchronization of the regulation of JO on PSA. In Implementing JO, PSA meets some obstacles. The obstacles is the procedure not clearly defined and there are some unsynchronize regulation. This thesis is prepared using descriptive analytical research method. The problems can be solved by synchronize the regulation and prepare the rule about JO procedure that consistent with the general principle of good governance.

Key words :

JO, PSA, Synchronization

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>x</b>
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Permasalahan .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Kerangka Konsep .....	9
1.5. Metode Penelitian .....	14
1.6. Sistematika Laporan Penelitian .....	16
<b>2. KAJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA OPERASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
2.1. Negara Dan Pelayanan Publik Yang Dilakukan Oleh Birokrasi.....	18
2.2. Prosedur Kerjasama Operasi Pada Badan Layanan Umum .....	25
2.3. Peraturan Perundang-Undangan .....	34
2.3.1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan.....	34
2.3.2. Landasan dan Asas Peraturan Perundang-Undangan.....	37
2.3.3. Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.....	45
2.3.4. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan.....	51
<b>3. PROSEDUR PELAKSANAAN KERJASAMA OPERASI BADAN LAYANAN UUMUM DAN PERBANDINGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN2005 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006</b>	
3.1. Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Operasi Badan Layanan Umum ..	60
3.1.1.Kedudukan Direktorat PPK BLU.....	60
3.1.2.Kedudukan Instansi BLU .....	67
3.1.3.BLU Dalam Pelaksanaan KSO.....	80
3.2.Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2006.....	80
3.2.1.Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2005 dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Keuangan Negara .....	80
3.2.2.KSO Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 .....	83



3.2.3. Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Keuangan Negara.....	85
3.3. Prosedur Pelaksanaan KSO Dalam Praktek .....	93
3.3.1. Prosedur Pelaksanaan KSO dari sisi PPK BLU .....	93
3.3.2. Prosedur Pelaksanaan KSO dari Instansi BLU .....	93
<b>4. ANALISIS PROSEDUR PELAKSANAAN KERJASAMA OPERASI BADAN LAYANAN UMUM DAN SINKRONISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006</b>	
4.1. Analisis Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Operasi Badan Layanan Umum .....	101
4.1.1. Analisis Prosedur Pelaksanaan KSO BLU dari Sudut PPK BLU.....	101
4.1.2. Analisis Prosedur Pelaksanaan KSO BLU dari sudut Instansi BLU	102
4.2. Analisis Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006.....	105
4.2.1. Analisis Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. ....	105
4.2.2. Analisis Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006.....	115
4.3. Analisis Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006.....	121
4.3.1. Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan. ....	124
4.3.2. Analisis Melalui Pendekatan Konsep.....	125
4.3.3. Analisis Melalui Pendekatan Historis.....	126
<b>5. PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	128
5.2. Saran.....	129

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR BAGAN

<b>BAGAN 1. SOP Pelaksanaan KSO Pada RS. Fatmawati .....</b>	<b>93</b>
<b>BAGAN 2. SOP Pelatihan Sertifikasi dan Penempatan Kerja B2PLKLN..</b>	<b>97</b>



